

STUDI KASUS HUKUM

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR
1091/PID.SUS/2018/PN.KIS TENTANG PENODAAN AGAMA
MELALUI MEDIA SOSIAL”**

(Studi Kasus Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN.KIS)

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

SYAFINAZ SALSABILLA DIANDRA

1710111077

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing ;

Dr. A. Irzal Rias, SH.,M.H

Dr. Siska Elvandari, SH.,M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR
1091/PID.SUS/2018/PN.KIS TENTANG PENODAAN AGAMA MELALUI
MEDIA SOSIAL**

(Syafinaz Salsabilla Diandra, 1710111077, Hukum Pidana, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 75 Halaman, Tahun 2021)

ABSTRAK

Tindak pidana penodaan terhadap agama banyak terjadi di Indonesia. Salah satunya kasus penodaan agama yang terjadi di Kabupaten Asahan yang dilakukan di media sosial. Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN.KIS adalah salah satu contoh tindak pidana penodaan terhadap agama yang dilakukan di media sosial. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penodaan agama di media sosial pada putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN.KIS? 2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penodaan terhadap agama melalui media sosial dalam putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN.KIS?. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Dokumen. Dari hasil penelitian, Penerapan Pidana dalam putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN.KIS telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah terbukti dan meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk memvonis Terdakwa dengan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dasar pertimbangan hakim pada perkara Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN.KIS terdiri dari 2 (dua) yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sanksi pidananya relatif lebih ringan dibandingkan dengan peraturan yang seharusnya. Dan juga putusan tersebut tidak mencapai keadilan karena ada beberapa hal yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Keyword : Penodaan Agama, Penodaan, Putusan Hakim, Media Sosial